

## SAPU JALAN DIPONEGORO, SANKSI SOSIAL BAGI GEPENG



Palangka Raya, (26/03/2025) – Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya kembali melakukan kegiatan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beraktivitas di ruang-ruang publik. Kegiatan ini berlangsung pada hari (26/03/2025) dengan salah satunya di kawasan Jalan Diponegoro. Operasi penjangkauan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Satpol PP Palangka Raya. Dalam kegiatan ini, sejumlah pengemis yang ditemukan mengemis secara aktif di area publik diamankan dan kemudian diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalanan di sepanjang Jalan Diponegoro. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mengedukasi mereka agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM.M.M.Kes menyampaikan bahwa pemberian sanksi sosial ini merupakan bagian dari strategi pembinaan sosial bukan sekedar hukuman semata. "Kami ingin mengedukasi, bukan menghukum. Dengan sanksi sosial yang bersifat mendidik ini, kami harap para pelaku pengemis bisa memahami bahwa ada cara lain yang lebih bermartabat untuk bertahan hidup selain mengemis," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas menambahkan bahwa penanganan gepeng harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan instansi terkait. Dinas Sosial tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi dari perangkat daerah khususnya yang bertugas menegakkan Perda yaitu Satpol PP Palangka Raya karena rangkaian penanganan Gepeng merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Sosial.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial juga terus mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalanan, karena tindakan tersebut justru memperkuat praktik mengemis yang tidak mendidik dan menyulitkan proses rehabilitasi sosial dari pemerintah.

Sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan kepedulian sosial melalui lembaga resmi, rumah ibadah, atau program-program sosial yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Dengan demikian, penanganan terhadap gepeng dapat dilakukan secara lebih sistematis, berkeadilan, dan menyentuh akar permasalahan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga.-(AK)